

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan laju perekonomian Indonesia saat ini merupakan peran dari Perbankan Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 4 Tentang Perbankan terkait Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pelaksanaan pembangunan perekonomian di Indonesia agar berjalan sesuai dengan tujuannya maka Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia melakukan pembina dan pengawasan kepada bank-bank Indonesia maka Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan yang tercantum pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat 2 Tentang Perbankan terkait bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif dan/atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgment* yang didasarkan atas materialitas dari faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian (IBI, 2016:10)

Peraturan tersebut dapat meminimalisir dampak negatif terhadap pelemahan ekonomi karena adanya bank yang tidak sehat sehingga berdampak buruk bagi perekonomian baik di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia pernah mengalami akibat adanya bank yang tidak sehat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa krisis moneter pada tahun 1998, dunia menyaksikan krisis keuangan Asia. Krisis ini awalnya bermula di Thailand pada 1997, sebelum akhirnya menyebar ke berbagai negara lain di kawasan, termasuk Indonesia. Sebelum krisis 1998 pecah, bank menyalurkan kredit secara sembrono setelah keluarnya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) yang memberi mereka ruang yang sangat fleksibel untuk membuka bank dan mengucurkan kredit. Akibatnya, penyaluran kredit meroket naik tetapi regulasi dan pengawasan perbankan jauh dari maksimal.

Ketika rupiah melemah, rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/ NPL*) pun meroket. Per akhir 1998, NPL perbankan Indonesia mencapai 48,6 %. Artinya, hampir setengah dari kredit yang disalurkan perbankan pada saat itu bermasalah. Hasil akhirnya pun dapat ditebak. Ketakutan melanda masyarakat karena bank-bank tempat mereka menyimpan dananya mengalami kesulitan likuiditas. Mereka lantas berbondong-bondong menarik dana di bank atau yang dikenal dengan istilah *bank rush*.

Bank rush terjadi, perekonomian akan 'mati'. Masalahnya perekonomian Indonesia sangat tergantung pada sektor perbankan untuk membiayai aktivitas ekonomi. Pendanaan dari pasar modal kurang maksimal. Pertumbuhan ekonomi tahun 1998 tercatat berkontraksi sebesar -13,1% diawali dengan kesulitan likuiditas akibat

merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Krisis tersebut menyebabkan pencabutan usaha enam belas bank swasta dan pengambil alihan kepengurusan bank.

Pada tahun 2008 Indonesia kembali mengalami krisis perbankan, krisis tersebut berdampak sistemik terhadap sektor perbankan, sehingga tingkat bunga diturunkan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Berulangnya krisis perbankan tersebut terjadi karena bank merupakan institusi kepercayaan yang rentan terhadap penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Terjadinya peristiwa tahun 2008 tersebut membuat bank umum di Indonesia harus mengambil kembali kepercayaan nasabah kepada bank dengan memberikan produk dan jasa perbankan yang sangat dibutuhkan oleh nasabah saat ini dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

Bank umum di Indonesia agar tidak mengalami peristiwa pada tahun 1998 dan 2008, Bank Indonesia menerbitkan pedoman perhitungan yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.6/23/DPNP Kepada Semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia Perihal Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum. Pedoman tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 dimana penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang meliputi *Capital* (Permodalan), *Asset Quality* (Kualitas Aset), *Management* (Manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), *Liability/Liquidity* (Likuiditas) and *Sensitivity to Market Risk* (Sensitivitas terhadap Risiko Pasar).

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini beberapa produk dan jasa yang ditawarkan bank kepada masyarakat beraneka ragam dan mengalami peningkatan

begitu juga resiko yang dihadapi bank ikut meningkat sehingga kurang efisien maka Bank Indonesia menyempurnakan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP. Pedoman tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan pendekatan risiko *Risk-based Bank Rating* (RBBR) baik secara konsolidasi atau individual yang terdiri dari Profil risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*); dan Permodalan (*Capital*).

Metode *Risk-based Bank Rating* (RBBR) yang terbaru ini sesuai dengan Surat Edaran (SE), metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi. Perbedaan CAMELS dan RBBR terdapat disalah satu faktornya yang mana dalam metode CAMELS belum terhubung satu sama lain sehingga belum memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana bank dikelola. Masing-masing komponen dan faktor dalam diagram masih dianalisis secara terpisah seperti *Asset Quality*, *Liquidity*, *Sensitivity to Market Risk*, dan belum memperhatikan adanya keterkaitan antara satu parameter dengan parameter lainnya. CAMELS juga belum memperhitungkan kinerja masa depan serta perbandingan bank dengan bank sejenis (*peer analysis*). Seperti dalam penilaian faktor *Asset Quality* pada CAMELS belum memperhitungkan potensi penurunan kualitas kredit atau potensi peningkatan NPL.

Pada RBBR penilaian Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren (*Inherent Risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko (*Risk Control System (RSC)*).

Risiko Inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko Inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal seperti strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penjabaran dari penerapan Basel II Pilar 2 dan mencakup 8 jenis risiko (risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan dan risiko reputasi).

Perbedaan signifikan pada metode RBBR terdapat pada komponen Profil Risiko (*Risk Profile*) yang pada intinya parameter atau indikator belum dapat memprediksi akan mengalami suatu kebangkrutan atau belum menentukan nilai akhirnya karena menggunakan matriks dua dimensi sedangkan pada metode CAMELS parameter atau indikator memprediksi bank tersebut akan mengalami kebangkrutan atau bisa langsung mengetahui nilai akhirnya.

Penelitian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMELS ini hanya fokus pada penerapan sistem manajemen risiko pasar atau lebih banyak terfokus pada sisi *upside* bisnis (pencapaian laba dan pertumbuhan) tetapi hanya sedikit membahas pada sisi *downside* (risiko). Terfokus pada sisi *upside* cenderung bias dan tidak berorientasi pencapaian jangka panjang sehingga penilaian tingkat kesehatan bank (mencakup sisi *upside* dan *downside*) menjadi solusi penilaian kinerja yang lebih komprehensif. Penelitian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) ini kita dapat mengetahui strategi dan kebijakan bisnis yang diambil oleh tiap-tiap

bank sehingga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan mengenai tingkat kesehatan bank.

Peneliti mengambil objek penelitian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk karena telah memperoleh berbagai macam penghargaan seperti pada tanggal April 2019, Bank Jatim juga memborong 4 (empat) penghargaan dari ajang TOP BUMD Award 2019 yang diselenggarakan oleh Bussiness News. Keempat penghargaan tersebut antara lain, Top BUMD Of The Year, TOP BUMD Best All Criteria, TOP BPD 2019, serta TOP CEO BUMD. Penghargaan tersebut menegaskan bahwa Bank Jatim sebagai salah satu BUMD milik Jawa Timur mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian melalui kinerja yang memuaskan. Bidang aksi keuangan berkelanjutan, Bank Jatim meraih peringkat Silver dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2019 yang diselenggarakan National Center For Sustainability Reporting (NCSR). Peringkat ini merupakan peningkatan peringkat dimana tahun 2018 Bank Jatim meraih peringkat bronze dan masih banyak lagi penghargaan yang diperoleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk menawarkan harga IPO di kisaran Rp 430 - Rp 670 per saham. Jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 2,983 miliar saham atau setara 20% dari modal ditempatkan. Dana yang ditargetkan dihimpun dari hajatan ini ialah Rp 1,28 triliun - Rp 1,99 triliun. Harga penawaran saham perdana PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) ditetapkan pada level terbawah yakni sebesar Rp 430 saham. Alasannya karena investor menyatakan harga tersebut merupakan harga ideal.

Data Bursa Efek Indonesia per 21 April 2016 menunjukkan, dari total 524 perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di pasar modal, 432 emiten berasal dari Jakarta, 27 emiten berbasis di Jawa Timur, dan 26 emiten berkantor pusat di Banten. Sampai dengan saat ini, emiten asal Jakarta menguasai 88,76 % kapitalisasi pasar di BEI, disusul oleh Banten 4,65 %, sedangkan Jawa Timur hanya 4,51 %. Kesempatan kali ini, bank jatim yang diwakili oleh Direktur Operasional Rudie Hardiono berkesempatan menjadi narasumber untuk berbagi cerita sukses keberhasilan *Initial Public Offering* (IPO) bank jatim pada tahun 2012. “IPO merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi *Regional Champion*. Manfaat yang didapat bank jatim setelah IPO pada tahun 2012 diantaranya, perolehan dana segar, optimalisasi struktur keuangan dan permodalan, serta peningkatan kinerja perusahaan”. Jelas Rudie Hardiono.

Bank jatim melakukan IPO tepatnya pada tanggal 12 Juli 2012 dengan kode emiten BJTM, bank jatim menawarkan 20% saham ke publik, dengan harga saham perdana sebesar Rp. 430 per lembar saham. “Antusiasme masyarakat sangat bagus, dimana sebesar 2,9 Miliar lembar saham terjual dengan *oversubscribed* 1,2x”. Imbuh Rudie Hardiono. Dana segar yang diperoleh bank jatim pada saat IPO sebesar 1,2 triliun. Rudie Hardiono menambahkan sebesar 80 % dana itu digunakan untuk ekspansi kredit, 10% untuk perluasan jaringan, dan sisanya untuk pengembangan teknologi dan informasi. Adanya IPO ini, saham bank jatim tidak lagi hanya dimiliki oleh pemerintah daerah, tetapi juga dimiliki oleh masyarakat luas. Hingga Maret 2016, kepemilikan saham publik didominasi oleh Investor Asing sebesar 67,71 % dari saham publik, dan 32,29 % dimiliki oleh Investor Domestik.

Kinerja keuangan bank jatim di Triwulan I ini menunjukkan performa yang baik dan pertumbuhan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya (*Year on Year / YoY*). Diantaranya terlihat dari pencapaian total aset sebesar Rp 49,15 triliun (naik 7,25 % *YoY*), Penyaluran kredit tumbuh sebesar Rp 28,27 triliun (naik 6,40 % *YoY*), Pendapatan Bunga bank jatim mengalami pertumbuhan sebesar Rp 1,16 triliun (naik 10,63 % *YoY*). Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp 41,51 triliun (naik 9,30 % *YoY*). Bank jatim bekerjasama dengan KPD Provinsi Jawa Timur berencana akan membuka 5 (lima) kantor cabang di luar Jawa, 2 (dua) diantaranya di Batam Provinsi Riau dan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, tujuan dari dibukanya kantor cabang ini adalah untuk memberikan *support* kepada Pelaku Usaha Jawa Timur di seluruh Indonesia. Karena itu penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang mana diambil sebelum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk mengikuti Initial Public Offering (IPO) dan sesudah mengikuti Initial Public Offering (IPO) untuk mengetahui perbandingan dari keduanya yang mana resiko tingkat kesehatan bank lebih besar dari sebelum mengikuti Initial Public Offering (IPO) atau sesudah mengikuti Initial Public Offering (IPO) yang mana Bank Pembangunan Daerah memiliki fungsi utama yang mana sebagai pendorong terciptanya perekonomian dan pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah dan atau menyimpan uang daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga Bank Pembangunan memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah. Diharapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dapat meningkatkan atau mempertahankan

kinerjanya secara maksimal sehingga dapat berpengaruh positif pada peningkatan perekonomian Negara disetiap daerah-daerah.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan ini dibuat sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka perlu ada suatu rumusan permasalahan yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebelum Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2009-2011 dan sesudah Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2012-2019 menggunakan pendekatan risiko *Risk-based Bank Rating* (RBBR)?
2. Bagaimana perbandingan tingkat kesehatan bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebelum Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2009-2011 dan sesudah Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2012-2019 dengan deskriptif komparatif menggunakan pendekatan risiko *Risk-based Bank Rating* (RBBR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang disusun dapat diketahui tujuan penelitian dari Tugas Akhir ini untuk menganalisis penilaian tingkat kesehatan bankPT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk baik sebelum Initial Public Offering (IPO) dan sesudah Initial Public Offering (IPO).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, sebagai informasi terkait tingkat kesehatan bank
2. Untuk Mahasiswa, menambah wawasan khususnya pada analisis kesehatan bank dan mengetahui kondisi kesehatan bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk,
3. Untuk Penulis, sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang tingkat kesehatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pertimbangan bagi pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dalam penilaian kinerja bank sehingga dapat menentukan strategi dan kebijakan bisnis pada bank, terutama dalam menjaga tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang terbaru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan pendekatan risiko *Risk-based Bank Rating* (RBBR)